

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN SEKTOR
UNGGULAN PRIMER**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Oleh:

SITI LAILATUL LATIPAH

5553200029

**KONSENTRASI EKONOMI PUBLIK
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2024

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN SEKTOR
UNGGULAN PRIMER**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Oleh:

SITI LAILATUL LATIPAH

5553200029

**KONSENTRASI EKONOMI PUBLIK
JURUSAN ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Siti Lailatul Latipah dengan NIM 5553200029, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul:

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sektor Unggulan Primer”.

Saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, Juni 2024



Siti Lailatul Latipah

5553200029

**PERSETUJUAN PENGESAHAN
PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI**

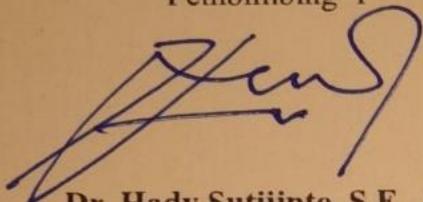
Skripsi dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SEKTOR UNGGULAN PRIMER**

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan **LULUS**
Pada hari Rabu, 26 Juni 2024 oleh Dewan Penguji.

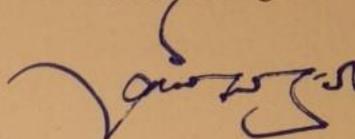
Serang, 26 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si
NIP. 197011052008121002

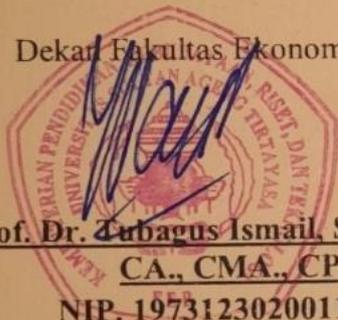
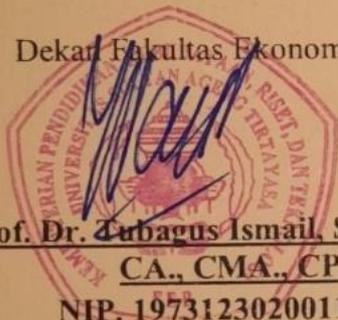
Pembimbing II



Rah Adi Fahmi Ginanjar, S.E., M.T
NIP. 198801052024211019

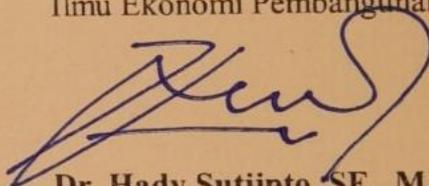
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., Ak., M.M.,
CA., CMA., CPA
NIP. 197312302001121001

Ketua Jurusan
Ilmu Ekonomi Pembangunan

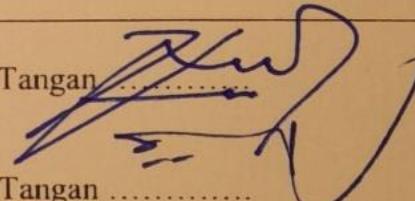


Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si
NIP. 197011052008121002

Dewan Penguji

Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si
NIP. 197011052008121002

Tanggal 1/8-24

Tanda Tangan 

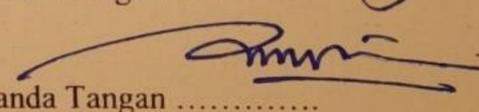
Dr. Sugeng Setyadi, S.E., M.Si
NIP. 198205302008121003

Tanggal 01/6-24

Tanda Tangan

Saharuddin Didu, S.TP., M.E
NIP. 197807042010121001

Tanggal 01/08-24

Tanda Tangan 

Nama : Siti Lailatul Latipah
NIM : 5553200029
Jurusan : Ilmu Ekonomi Pembangunan
Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.” – Q.S Yusuf ayat 87

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” –
Q.S Al-Baqarah ayat 286*

*“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-
ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.” – Imam Al Ghazali*

*“Sebaik-baiknya kamu merencanakan sesuatu, tetapkan rencana Allah yang
terbaik.” – Lail*

Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini

Untuk kedua orangtuaku tercinta yang selalu mendo'akan serta mendukungku

Terima kasih banyak atas segala yang diberikan, baik do'a, kasih sayang, serta
dukungan moral dan materi yang tiada henti

Semoga Ayah dan Mamah selalu dalam lindungan-Nya dan diberikan kesehatan
serta panjang umur

ABSTRACT

Regional autonomy has been implemented for more than two decades. However, local governments still struggle to manage their finances independently. Issues with the implementation of regional autonomy can arise both domestically and internationally. Domestically, conditions indicate that citizens desire transparency and autonomy (decentralization). Meanwhile, internationally, increasing globalization demands competitiveness from each country, including local governments. This research aims to identify factors influencing regional financial independence, specifically primary output factors, natural resources revenue sharing funds, general allocation funds, special allocation funds, and tax ratio. The study employs panel data consisting of time series data from 2018 to 2022 and cross-sectional data from 140 districts in Indonesia with primary economic sectors. The analytical method used in this study is the Generalized Method of Moments (GMM) with the System Generalized Method of Moments (SYS-GMM) approach. The results of this study indicate that the primary output variable and tax ratio have a positive and significant influence on regional financial independence. Additionally, natural resource revenue sharing funds and general allocation funds have a negative and significant influence on regional financial independence. However, the special allocation funds variable does not affect regional financial independence.

Keyword: Regional Autonomy, Regional Financial Independence, Primary Output, GMM

ABSTRAK

Otonomi daerah telah dilaksanakan lebih dari dua dekade, akan tetapi pemerintah daerah masih belum mampu untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Permasalahan yang terjadi dalam implementasi otonomi daerah dapat terjadi dari dalam maupun luar negeri. Kondisi dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Sementara kondisi luar negeri menunjukkan bahwa semakin maraknya kemajuan globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, meliputi daya saing pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, khususnya faktor output primer, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta *tax ratio*. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data *time series* pada tahun 2018 – 2022 serta data *cross-section* pada 140 Kabupaten di Indonesia yang memiliki sektor unggulan primer. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode *Generalized Method of Moments* (GMM) dengan pendekatan *System Generalized Method of Moments* (SYS-GMM). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel output primer dan *tax ratio* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, dana bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara, variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Output Primer, GMM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sektor Unggulan Primer”** dan penulis berharap dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada masyarakat dan juga peneliti sendiri.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun yang lainnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, doa, usaha, bimbingan, serta dukungan baik materi maupun moral yang diberikan dari berbagai pihak sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan. Adapun rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Prof. Dr. Tubagus Ismail, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Bapak Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dukungan, serta nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Saharuddin Didu, S.TP., M.E., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, atas bantuannya dalam mempersiapkan kegiatan sidang dengan baik.
5. Bapak Tony S. Chendrawan, S.T., S.E., M.Si., selaku Kepala Laboratorium Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Bapak Rah Adi F. Ginanjar, S.E., M.T., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, motivasi, arahan, dukungan, serta nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Stannia Cahaya Suci, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing penulis sejak awal perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, atas pengetahuan, bimbingan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Surnadi dan Ibu Nurhayati, serta partner saya Ainul Yaqin yang telah menjadi penyemangat dan motivator terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Atas dukungan dan motivasi merekalah penulis dapat selalu semangat

dan berusaha semaksimal mungkin sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Sahabat saya, Salsabilla Adinda Rizky, Sylvia Nursarila dan Fatimah Azzahro. Terima kasih banyak sudah selalu mendukung dan menjadi tempat berkeluh kesah. Atas dukungan dan motivasinya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kawan seperjuanganku selama perkuliahan Octa Widya Pratiwi, Suci Eka Pertiwi, Putri Mega Wardini, Siti Ahyuni, Dilya Alvyanti dan Eva Latifah. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi dan perkuliahan.
12. Teman-teman Asisten Laboratorium Ilmu Ekonomi Pembangunan 9G dan 10G. Khususnya Aslab 9G Syafira Febriyanti, Farah Naili Zulfa, Loanna Zahra Mahintan, Nasarudin, Ridwan Maulana, Yeremia Sahat Kirana yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya untuk kegiatan praktikum dan perkuliahan.
13. Teman-teman KKM Kelompok 46, terima kasih atas semua pengalaman menyenangkan selama pengabdian 1 bulan di Desa Cikeusik, yang tentunya menjadi salah satu memori berharga bagi penulis.
14. Teman-teman seperjuangan di Asrama, khususnya Teh Siti Umyati, Alfiah, Teh Lela Saro, dan Eem Hulaemah, terima kasih telah mewarnai lembaran kisah penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
15. Bapak dan Ibu Karyawan PT Belitang Panen Raya – Cakung, terima kasih atas semua pengalaman dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

16. Teruntuk Dmitriev Abraham Hariyanto, terima kasih telah menghibur dan menemani penulis selama semester akhir dengan wajah serta tingkahnya yang lucu dan menggemaskan.

Selain itu, kepada seluruh pihak yang terlibat selama masa perkuliahan maupun penyusunan skripsi yang tidak dapat dituliskan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun bagi penulis.

Serang, Juni 2024
Penulis,

Siti Lailatul Latipah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kegunaan Hasil Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Kajian Teoritis	16
2.2 Kajian Empiris.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran	38
2.4 Hubungan Antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat.....	40
2.5 Hipotesis Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	46

3.3	Operasionalisasi Variabel	46
3.4	Model Penelitian dan Teknik Analisis Data	48
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	58
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
4.2	Analisis Deskriptif.....	58
4.3	Hasil Uji Hipotesis.....	67
4.4	Pembahasan.....	79
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1	Kesimpulan.....	106
5.2	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ketentuan Kemandirian Keuangan Daerah.....	25
Tabel 2.2 Kajian Empiris.....	33
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	47
Tabel 4.1 Hasil Estimasi Pendekatan FD-GMM	68
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Pendekatan SYS-GMM	69
Tabel 4.3 Hasil Uji Sargan Pendekatan FD-GMM dan SYS-GMM.....	70
Tabel 4.4 Hasil Uji Arellano-Bond Pendekatan FD-GMM dan SYS-GMM	71
Tabel 4.5 Hasil Uji Ketidakbiasan Model Fixed Effect Model, FD-GMM, SYS-GMM, dan Pooled Least Square.....	72
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Model SYS-GMM.....	74
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Parsial	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Provinsi di Indonesia (Persen)	6
Gambar 1.2 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Pada 10 Kabupaten Tertinggi di 140 Kabupaten Indonesia (Persen).....	7
Gambar 1.3 Rata-rata Output Primer dan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018–2022 (Persen dan Miliar Rupiah)	10
Gambar 1.4 Rata-rata DBH SDA dan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018–2022 (Persen dan Juta Rupiah)	12
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	39
Gambar 4.1 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia (Persen)	59
Gambar 4.2 Perkembangan Output Primer di 140 Kabupaten di Indonesia (Miliar Rupiah)	61
Gambar 4.3 Perkembangan Dana Bagi Hasil SDA di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)	62
Gambar 4.4 Perkembangan Dana Alokasi Umum di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)	64
Gambar 4.5 Perkembangan Dana Alokasi Khusus di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)	65
Gambar 4.6 Perkembangan Tax Ratio di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018 – 2022 (Persen)	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian.....	113
Lampiran 2. Hasil Uji Pemilihan Model FD-GMM	135
Lampiran 3. Hasil Uji Pemilihan Model SYS-GMM	136
Lampiran 4. Hasil Ketidakbiasan Model	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah telah hadir di Indonesia selama lebih dari 2 (dua) dasawarsa, sejak terjadinya gerakan reformasi tahun 1998. Akan tetapi, otonomi daerah secara legal diterapkan di Indonesia sejak UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah mulai diberlakukan dan peraturan tentang otonomi daerah yang masih aktif hingga kini yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya diterapkan di level Kabupaten/Kota. Akan tetapi, pemerintah menggunakan masa transisi peralihan kewenangan secara tidak langsung sehingga nantinya asas desentralisasi dan dekonsentrasi dapat terlaksana secara optimal. Pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota dinilai lebih penting karena menitikberatkan otonomi daerah mungkin dalam jangka panjang lebih penting daripada pelaksanaannya di level Provinsi (Kaloh, 2007:52).

Sejauh ini, banyak sekali hambatan yang dilalui Indonesia selama otonomi daerah diterapkan. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh wilayah di Indonesia yaitu keragaman dalam banyak hal, seperti potensi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya insani, infrastruktur, budaya, dan lain-lain, sehingga implementasi otonomi daerah menjadi masalah seragam yang cukup serius. Otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemda bertujuan untuk mengembangkan mekanisme demokrasi pada level daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah lokal maupun kepentingan kebijaksanaan politik

nasional dalam era reformasi (Kaloh, 2007:53). Kondisi dalam negeri menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan transparansi dan kemandirian melalui desentralisasi. Di sisi lain, perkembangan luar negeri semakin memperlihatkan pesatnya globalisasi yang menuntut setiap negara, termasuk pemda dalam meningkatkan daya saing (Halim, 2008: 1).

Sejalan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda, pemerintah di daerah tingkat kabupaten diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mengimplementasikan seluruh kegiatan pemerintahan yang diawali dengan perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian, hingga evaluasi, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan bidang politik luar negeri yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Akibat dari adanya kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan di daerahnya. Kewajiban tersebut dapat tercapai apabila pemda mampu mengelola segala potensi daerahnya (sumber daya alam, sumber daya insani, sumber daya keuangan) secara optimal (Halim, 2008:229).

Kebijakan otonomi daerah mengikuti dengan perkembangan zaman yang ada saat ini sehingga UU No. 22 Tahun 1999 tidak lagi diberlakukan karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan implementasi otonomi daerah. Kemudian peraturan tersebut digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda yang pada akhirnya kembali diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda karena dirasa perlu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini. UU ini memandang otonomi daerah sebagai hak, wewenang, serta kewajiban suatu daerah yang otonomi untuk

mengatur dan mengelola sendiri segala aktivitas pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Melalui implementasi otonomi daerah, dapat dilihat bagaimana kemandirian keuangan di suatu daerah. Dalam publikasi Deskripsi dan Analisis APBD dalam DJPK Kemenkeu pada tahun 2011, rasio kemandirian keuangan disajikan dalam perbandingan PAD dengan total pendapatan daerahnya. Jika nilai rasio kemandirian tinggi mencerminkan bahwa PAD suatu daerah tersebut besar sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut telah mandiri secara keuangan. Agar tujuan otonomi daerah semakin optimal dan kemandirian keuangan daerah terus meningkat, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU ini diharapkan dapat memberikan efek positif dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan menjadi kunci pokok agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan potensi daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengimplikasikan kemampuan pemda dalam mendanai sendiri segala kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Tingkat kemandirian yang semakin tinggi mengandung arti bahwa ketergantungan daerah terhadap dana bantuan eksternal semakin rendah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Jika nilai rasio kemandirian semakin tinggi, maka partisipasi masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi daerah juga semakin tinggi yang mana hal tersebut merupakan komponen utama dari PAD, sehingga akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat (Halim, 2008: 232-233).

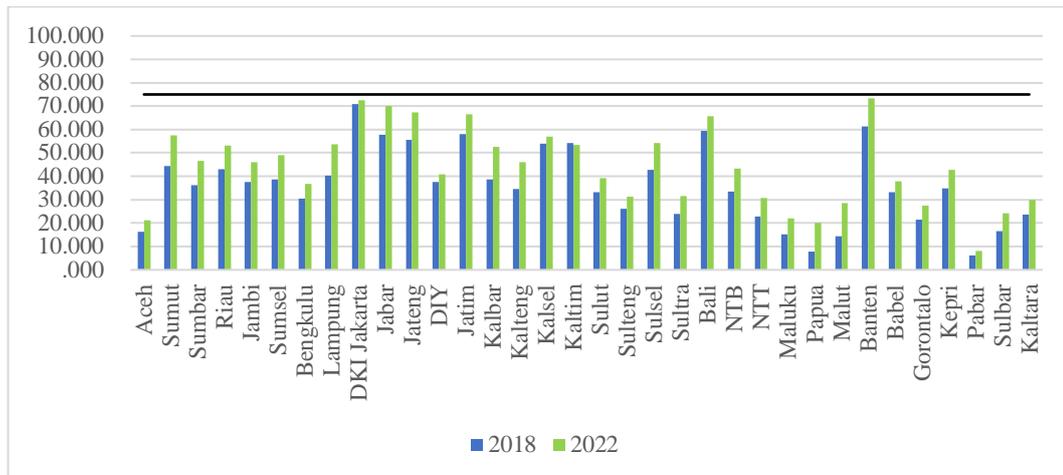
Dalam hal otonomi daerah, yang menjadi permasalahan bukanlah tentang pelimpahan kewenangan dan pembiayaan ke daerah, akan tetapi keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya keuangan daerah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat (Yani, 2004: 229-230). Dalam prinsipnya, suatu daerah harus melaksanakan otonomi dengan bertanggung jawab guna mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu memperkuat kemampuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan terus mementingkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selain itu, penyelenggaran otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya agar tidak terjadi ketimpangan, serta mampu menjamin keserasian hubungan dengan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pembinaan, pelatihan, pengawasan, memberikan fasilitas berupa kemudahan, bantuan, serta dorongan agar otonomi daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai perundang-undangan (Djaenuri, 2012: 9-12).

Untuk meminimalisir sikap pemerintah daerah dari dependensi pemerintah pusat, maka bisa dilakukan pengukuran pada tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Indikator tersebut merupakan sebuah pengukuran guna mengetahui seberapa mandiri suatu daerah dalam menyelenggarakan pendanaan untuk semua aktivitas pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat menggunakan pendapatan yang diperolehnya. Dengan mengetahui besaran kemandirian keuangan

daerah, dapat diketahui pula apakah pemerintah daerah sudah optimal dalam menentukan aturannya sendiri dan apakah pemerintah daerah telah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya.

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur dengan memperhitungkan jumlah realisasi PAD itu sendiri, kemudian dibandingkan dengan pendapatan eksternal seperti bantuan dari pemerintah pusat dan pinjaman. Indikator tersebut dapat menentukan kepiawaian pemerintah daerah untuk secara mandiri mendanai semua aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (Halim, 2007). Semakin besar kemandirian keuangan suatu daerah, berarti bahwa pemerintah daerah semakin independen dalam mengatur urusan keuangan daerah yang mana akuntabilitas pemerintah daerah di mata masyarakat dapat dioptimalkan.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil revidi atas kemandirian Fiskal Pemda tahun 2020, menyebutkan bahwa ada sebanyak 443 dari 503 pemda atau 88,07% yang masih berada dalam kategori “Belum Mandiri”. Hal tersebut berarti hampir seluruh pemda masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk mendanai belanja masing-masing pemda. Bahkan, BPK juga menyebutkan bahwa ada sebanyak 468 pemda berada dalam kondisi stagnan pada kategori belum mandiri selama 11 tahun ke belakang hingga tahun 2020. Adapun perkembangan kemandirian keuangan pada tingkat Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.



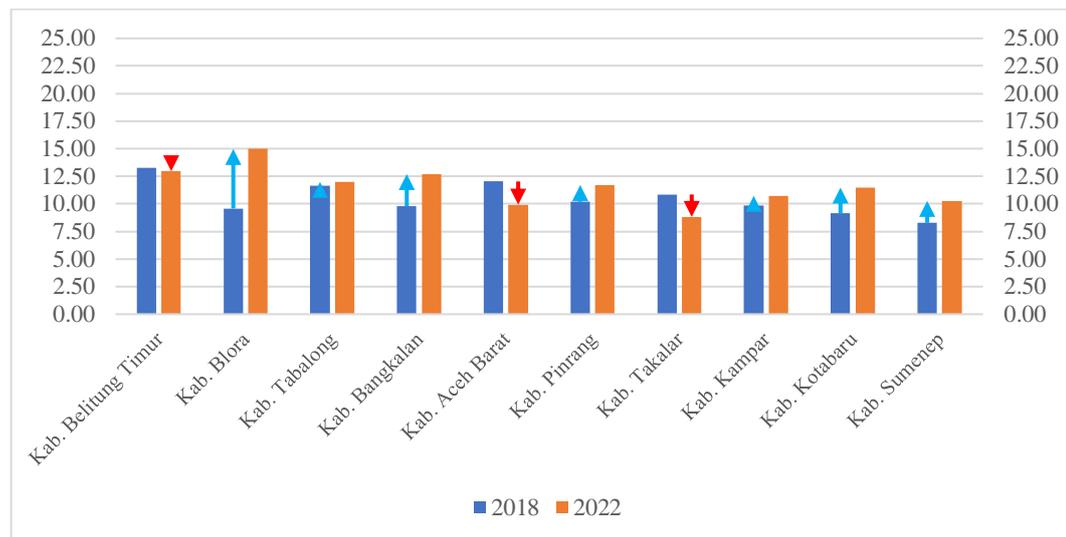
Sumber: DJPK Kemenkeu, (diolah) 2024

Gambar 1.1 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Provinsi di Indonesia (Persen)

Dapat dilihat Gambar 1.1 mengenai perkembangan tingkat kemandirian di 34 Provinsi Indonesia pada tahun 2018 dan 2022, menunjukkan bahwa seluruh Provinsi masih di bawah kategori kemandirian “tinggi” yang berada pada rentang 75 hingga 100 persen. Jika dilihat, sudah banyak daerah yang semakin mandiri dalam mengurus segala kegiatan pemerintahannya yang mana ditandai dengan peningkatan yang terjadi di tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa pemda telah memaksimalkan pendapatan asli daerahnya untuk memenuhi segala kepentingan masyarakat lokal.

Secara umum, dipercayai bahwa penerapan sistem kemandirian fiskal ini mampu meningkatkan pembangunan manusia yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Pengukuran kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kemudahan dalam mengakses seluruh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik yang harus terpenuhi dengan baik dan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Agar menjadi daerah yang otonom dari segi keuangan, maka pemda perlu berperan aktif dalam

mengelola potensi di daerahnya guna menaikkan pendapatan daerahnya sendiri. Namun apabila pendapatan daerah tidak dapat mencukupi kegiatan pemerintahan, maka biaya yang dikeluarkan untuk belanja daerah juga akan sulit. Jika potensi pendapatan daerah tersebut besar, sementara potensinya belum bisa dikelola dengan baik maka nantinya tidak dapat mempengaruhi besaran pendapatan daerah. Secara teori, apabila daerah memiliki potensi pendapatan yang sangat besar maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan semakin besar. Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya tidaklah begitu.



Sumber: DJPK Kemenkeu, (diolah) 2024

Gambar 1.2 Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Pada 10 Kabupaten Tertinggi di 140 Kabupaten Indonesia (Persen)

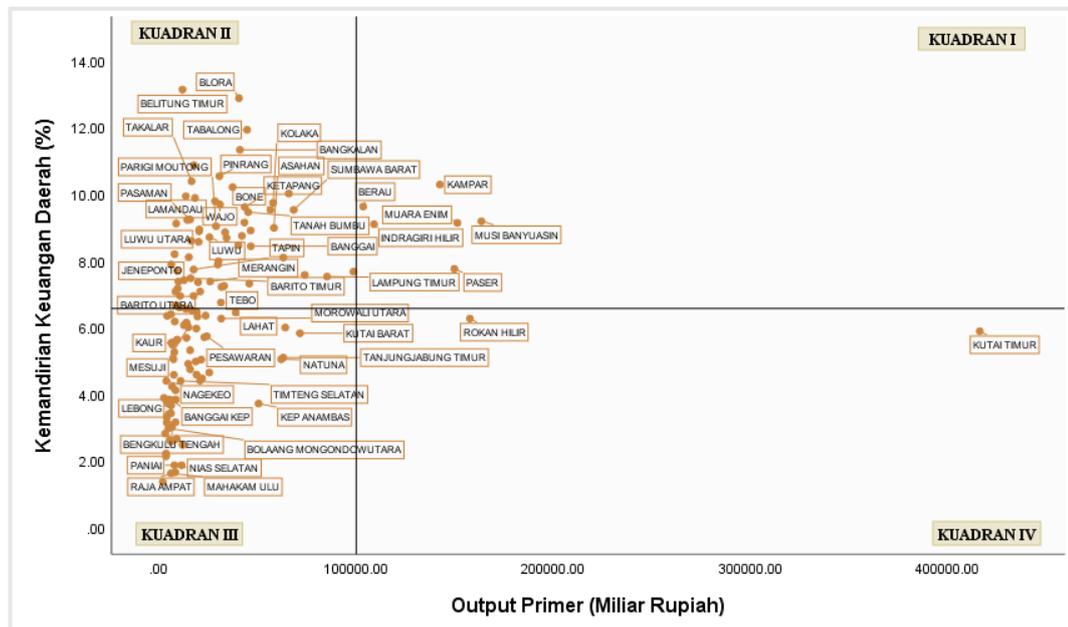
Gambar 1.2 menyajikan perkembangan 10 Kabupaten dengan tingkat kemandirian keuangan tertinggi dibandingkan 140 Kabupaten lainnya yang ada di Indonesia pada tahun 2018 dan 2022. Dapat disimpulkan bahwa tiap wilayah memiliki tingkat kemandirian yang beragam. Pada Kab. Blora, Kab. Tabalong, Kab. Bangkalan, Kab. Pinrang, Kab. Kampar, Kab. Kotabaru, serta Kab. Sumenep mendapati hasil bahwa kemandirian keuangan mengalami peningkatan dari tahun

2018 ke tahun 2022. Sementara Kab. Belitung Timur, Kab. Aceh Barat dan Kab. Takalar justru mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Meski lebih banyak yang mengalami peningkatan di tahun 2022, akan tetapi tingkat kemandirian masing-masing wilayah masih sangat rendah yang mana ditunjukkan pada gambar yang hanya berada di antara rentang 0,00 – 25,00% saja. Dimana hal ini menandakan bahwa pemda masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan belum mampu mengelola pendapatan daerahnya dengan optimal. Padahal, paradigma pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai acuan dalam pengimplementasian otonomi daerah. Secara hakikat, kekayaan daerah didapatkan dari pemberian kesempatan luas kepada pemda untuk mengelola dan memaksimalkan potensi masing-masing wilayah, termasuk sumber daya alam, anggaran, sumber daya insani, hingga sumber daya lainnya (Rochmah, 2015).

Tujuan penerapan otonomi daerah pada masing-masing pemda yaitu agar pemda mampu meningkatkan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, demokratis, dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemda harus mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya insani dan sumber daya keuangan secara efektif. Keberhasilan pemda dalam mengatur dan mengelola keuangan dapat dilihat dari realisasi APBD tahun berjalan (Periansya, 2019). Untuk melihat pendapatan pemda melalui kekayaan alam yang ada, maka kita perlu melihat basis sektor ekonomi dari masing-masing daerah tersebut. Struktur ekonomi dibagi menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu: a) Sektor primer, dengan kategori pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian;

b) Sektor sekunder, dengan kategori industri pengolahan, listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, daur ulang, dan konstruksi; serta c) Sektor tersier, dengan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kegiatan dan jasa lainnya.

Sektor pertanian memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap peningkatan PDRB dan perolehan devisa negara, serta fakta bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor ini. Pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan distribusi pendapatan daerah merata, serta dapat menjadi sumber lapangan kerja bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Julia, et al., 2015). Berikut adalah keterkaitan antara pertumbuhan sektor primer terhadap kemandirian keuangan di 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer:



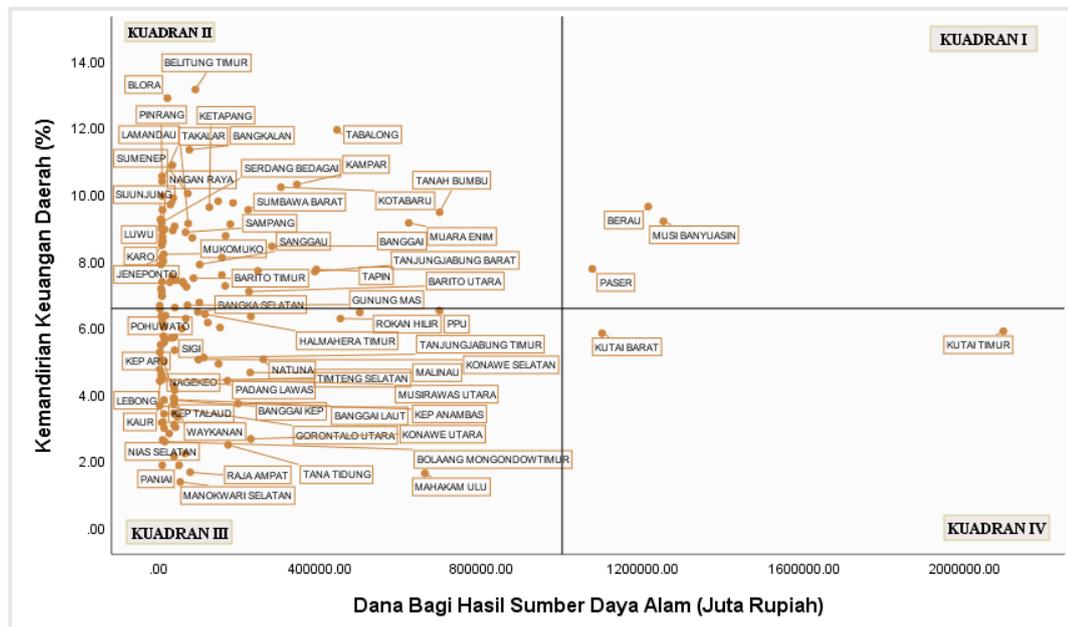
Sumber: DJPK Kemenkeu dan BPS Indonesia, (diolah) 2024

Gambar 1.3 Rata-rata Output Primer dan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018–2022 (Persen dan Miliar Rupiah)

Gambar 1.3 menggambarkan rata-rata output primer dan kemandirian keuangan pada 140 Kabupaten di Indonesia dari tahun 2018-2022. Mayoritas Kabupaten berada pada Kuadran II dan III. Pada Kuadran II, menandakan bahwa Kabupaten yang memiliki pendapatan sektor primer kurang dari Rp100.000 miliar akan tetapi tingkat kemandirian keuangannya cukup tinggi. Sebaliknya, Kuadran III mencerminkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan nilai yang rendah daripada Kabupaten lain. Daerah yang berada di Kuadran I yaitu Kampar, Berau, Muara Enim, Indragiri Hilir, Musi Banyuasin, dan Paser memiliki output primer lebih dari Rp100.000 miliar serta tingkat kemandirian keuangan daerah di atas rata-rata 6,56%. Akan tetapi, Kabupaten Kutai Timur dan Rokan Hilir membuktikan bahwasanya daerah dengan basis sektor unggulan primer justru tidak berarti bahwa daerah tersebut sudah mandiri dalam mengatur keuangannya. Artinya, pengelolaan

potensi sumber dayanya belum optimal sehingga nilai sektor primer tidak dapat menyumbangkan kepada pendapatan asli daerahnya.

Menurut penelitian (Umam, 2017; Oki, 2019; Adha, 2022) mengungkapkan bahwa output primer berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Hal ini berarti peningkatan yang terjadi pada output primer dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sektor pertanian menjadi sektor terpenting dalam suatu perekonomian Indonesia karena jika dilihat dari peningkatan PDRB dan perolehan devisa negara yang menunjukkan bahwa sektor ini menjadi penting di Indonesia. Sementara (Fatmala, 2020) dalam temuannya mengungkapkan bahwa sektor pertanian memberikan pengaruh yang positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal.



Sumber: DJPK Kemenkeu, (diolah) 2024

Gambar 1.4 Rata-rata DBH SDA dan Kemandirian Keuangan Daerah di 140 Kabupaten di Indonesia Tahun 2018–2022 (Persen dan Juta Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas, menyajikan rata-rata DBH SDA terhadap kemandirian keuangan daerah di 140 Kabupaten dari tahun 2018 – 2022. Dapat diketahui bahwa Kuadran II didominasi oleh Kabupaten dengan rasio kemandirian keuangan melebihi rata-rata 6,56% dengan nilai DBH SDA yang rendah. Begitu pula dengan Kuadran III yang menunjukkan bahwa cukup banyak Kabupaten yang memiliki tingkat kemandirian rendah serta pengalokasian DBH SDA yang cukup rendah. Dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur yang berada di Kuadran IV dengan alokasi DBH SDA yang tinggi tetapi tingkat kemandiriannya justru berada di bawah rata-rata 6,56%. Sementara Kabupaten Berau, Paser dan Musi Banyuasin memiliki alokasi Dana Bagi Hasil SDA yang besar dan tingkat kemandirian keuangan yang tinggi, akan tetapi belum mencapai 25%.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan pelayanan

publik, memanfaatkan peran aktif masyarakat setempat, dan mendorong peningkatan daya saing antarwilayah. Ide dari penerapan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun penyelenggaraan dana perimbangan merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah (Olivia, 2020). Pemberian dana transfer dari pusat bertujuan agar pemda dapat mengembangkan potensi daerahnya secara mandiri. Dana Bagi Hasil SDA adalah salah satu bentuk dana perimbangan yang berasal dari beberapa sektor seperti sektor kehutanan, perikanan, pertambangan panas bumi, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas bumi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sanga, et al., 2018; Marzuki, et al., 2022; Natasya, et al., 2024) mengungkapkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut berarti semakin besar penyaluran dana bagi hasil SDA kepada daerah maka dapat membuat daerah tersebut mandiri. Sementara, (Verawaty, et al., 2017; Martini, et al., 2019; Indrianingrum & Priyono; 2023; Rahayu, et al., 2024) justru berpendapat bahwa dana bagi hasil memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penentu kemandirian keuangan daerah pada 140 Kabupaten dengan sektor unggulan primer, khususnya mengenai pengaruh variabel output primer, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta *tax ratio* dari tahun 2018 – 2022 dengan menggunakan analisis regresi data panel dinamis melalui pendekatan *first-*

difference GMM dan *System* GMM untuk pemodelan tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian yang ada sebelumnya, maka dapat diangkat rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh output primer terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer?
2. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer?
4. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer?
5. Bagaimana pengaruh *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer?

1.3 Tujuan Penelitian

Jika melihat beberapa masalah yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat dinyatakan tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh output primer terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
2. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh dana bagi hasil sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.

3. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
4. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.
5. Untuk mengetahui seperti apa pengaruh *tax ratio* terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten sektor unggulan primer.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hadirnya penelitian ini dapat membantu memberikan kontribusi ilmiah tentang perkembangan fiskal daerah, terutama terhadap kemandirian keuangan di daerah dengan beberapa faktor desentralisasi fiskal sehingga hasil penelitian mampu dijadikan sebagai acuan bagi para peneliti kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Dengan hadirnya penelitian ini, penulis mengharapkan jika hal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan sebagai langkah peningkatan kemandirian keuangan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A. N. (2022). Model Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi di Indonesia. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Anisa, S. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah pada Daerah Hasil Pemekaran (Studi Kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Banten dan Gorontalo). Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations (Vol. 58, Issue 2).
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data (Third Edition)*.
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. In *Journal of Econometrics* (Vol. 87).
- Direktorat Dana Perimbangan. (2017). *Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah: Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Fatmala, W., & Baubau, P. (2020). Pengaruh Sektor Ekonomi Dominan terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (Vol. 8).
- Ginanjar, R. A. F., Zahara, V. M., Suci, S. C., & Suhendra, I. (2020). Human Development Convergence and the Impact of Funds Transfer to Regions: A Dynamic Panel Data Approach. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 593–604. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.593>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Edisi Kelima)*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Haryanto, A. F. A. N. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.
- Hendri, W., & Utama, M. S. (2019). Analysis of Factors that Influence The Independence of Regional Finance In West Nusa Tenggara Province. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 89(5), 169–175. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-05.20>
- Indrianingrum, H., & Priyono, N. (2023). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magelang pada Tahun 2006 – 2021. *Jurnal Economina*, 2 (1).

- Jensen, M. C. , & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *In Journal of Financial Economics* 3, 305–360.
- Julia, D., Asmara, A., & Heriyanto, D. (2015). Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Sektor Pertanian di Provinsi Riau The Impact of Fiscal Policy on Performance of Agriculture in Riau Province. *Jurnal Dinamika Pertanian*, 233–248.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (Edisi Revisi)*. PT Rineka Cipta.
- Listya Nindita, N., & Rahayu, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Journal Accounting and Finance Edisi*, 2(1). <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf>
- Martadinata, M. A. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja, Investasi, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(1), 37.
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>
- Martha, I., Hendrati, & Manurung, M. (2012). Exploring Indonesia Tax Ratio Development 1970-2010. *Public Finance Management Conference*.
- Marzuki, Akhyar, C., Nurlela, & Yandani, F. (2022). Pengaruh Penerimaan APBD terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Visioner & Strategis*, 11(1).
- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Sunstansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 5 (1).
- Oki, K. K. (2019). Dampak Otonomi Daerah terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT Impact Of Regional Autonomy On Fiscal Capacity In The District Of Timor Tengah Utara, Ntt Province. In *EKOPEM | Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 4, Issue 2). Online.
- Olivia, D. (2020). Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dalam Kerangka Penyelenggaraan Desentralisasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(Desember), 85–93.
- Periansya. (2019). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Vol. 05). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/indez.php/i-finance>
- Prapat, E. P., Hutagalung, D. S., & Malau, E. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Pematangsiantar. *JAMIN*, 3(1).
- Rahmadani, F. (2022). Factors Affecting Regional Financial Independence in the Special Region of Yogyakarta. *Efficient: Indonesian Journal of*

- Development Economics*, 5(1), 1468–1478.
<https://doi.org/10.15294/efficient.v5i1.50786>
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. In *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi Tahun* (Vol. 3).
- Rochmah, S. N. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Roodman, D. (2009). Practitioners' corner: A note on the theme of too many instruments. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 71(1), 135–158.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2008.00542.x>
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, L. M., Nurhaida, & Oktavia, E. (2021). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Menara Ekonomi*, VII (1).
- Shah, A. (1994). *A Fiscal Needs Approach to Equalization in a Decentralized Federation* (Policy Research Working Paper No. 1289)
- Siringo, R. W. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4 (4), 200–213.
- Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah).
- Suyanto. (2010). Flypaper Effect Theory dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 11, Issue 1).
- Umam, K. (2017). Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pembangunan Dan Pemerataan*, 6(2).
- Verawaty, Fransisca, S., & Rahmawati, R. (2017). Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 16(1), 1–10.
- Yani, A. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.